

## **BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

### **A. Urusan Konkuren**

#### **b. Ringkasan Urusan Pilihan (PERDAGANGAN)**

##### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 121 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

##### **TUGAS POKOK**

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan

##### **FUNGSI**

- a. perumusan kebijakan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait bidang perdagangan.

##### **2. Program, Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran**

###### **a). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

###### **1. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**

Alokasi Anggaran : Rp.490.309.372

Realisasi Anggaran : Rp. 474.884.107 (96,854%)

Tingkat Capaian :

- Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Barang 312 ob
- Jumlah Alat Tulis Kantor 25 Jenis
- Jumlah Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering) 15 Jenis

- Jumlah Perangko Materai Dan Benda Pos 1.700 Lembar
- Jumlah Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 30 jenis
- Pembayaran Telepon 12 Bulan
- Jumlah Surat Kabar/Majalah 1.080 Eksemplar
- Jumlah Barang Cetak 26 Jenis
- Jumlah Penggadaan 110.840 Lembar
- Jumlah Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 13.000 oh
- Jumlah penyediaan tas 110 Unit

2. Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Alokasi Anggaran : Rp. 1.045.029.778

Realisasi Anggaran : Rp. 1012.748.955 (96,911%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Makan Minum Rapat 969 orang
- Jumlah peserta Makan Dan Minum Pelaksanaan Kegiatan 3.247 orang
- Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 210 op
- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 210 op
- Jumlah peserta sosialisasi terkait Perdagangan 150 orang

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 4.358.030.612

Realisasi Anggaran : Rp. 4.041.154.565 (92,729%)

Tingkat Capaian :

- Pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak 3.607.200.000, 2.160 Ob
- Pembayaran Sewa Tanah/Lahan Untuk Pasar 12 Pasar

**b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

1) Kegiatan Pengadaan / Rehabilitas Kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi Anggaran : Rp. 57.875.000

Realisasi Anggaran : Rp. 53.585.000 (92,587%)

Tingkat Capaian :

- Pengadaan kendaraan bermotor roda tiga ,Jumlah 2 Unit

2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan

Alokasi Anggaran : Rp. 576.590.000

Realisasi Anggaran : Rp. 569.048.900 (98.692%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah penyediaan perlengkapan kantor, gerobak sampah, pompa air, rak arsip AC, Kulkas, kipas angin, dispenser, speaker, , sound system, 95 unit
- Jumlah penyediaan peralatan kantor (komputer dan kelengkapannya, laptop, printer, handycam, kamera, GPS, CCTV) 23 unit
- Jumlah penyediaan display barang, 1 unit

3) Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor Dinas/Operasional

Alokasi Anggaran : Rp. 275.875.000

Realisasi Anggaran : Rp. 256.183.150 (92,862%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Gedung kantor terpelihara 1 unit
- Jumlah ruang rapat/ ruang kerja yang di rehab 1 paket

4) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi Anggaran : Rp. 352.250.000

Realisasi Anggaran : Rp. 338.952.308 (96.225%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah kendaraan dinas terpelihara 38 unit
- Tersedianya Bahan Bakar Minyak /Gas Dan Pelumas operasional 21.547 Liter

5) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan

Alokasi Anggaran : Rp. 45.000.000

Realisasi Anggaran : Rp. 44.757.400 (99.461%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah peralatan, mesin dan perlengkapan kantor terpelihara 45 unit

**c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1) Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Alokasi Anggaran : Rp 93.485.000

Realisasi Anggaran : Rp91.837.500 (98.238%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah peserta diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 85 Orang

**d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

1) Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

Alokasi Anggaran : Rp. 126.550.000

Realisasi Anggaran : Rp. 124.596.500 (98.456%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah pendampingan Implementasi SMM, 8 kali

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian Dan Ketatausahaan

Alokasi Anggaran : Rp. 78.750.000

Realisasi Anggaran : Rp. 75.496.000 (95.868 %)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Dokumen Perencanaan / Evaluasi yang di hasilkan 12 Dokumen
- Jumlah Peserta FGD Perencanaan 60 orang
- Jumlah FGD Monev 30 orang

**e) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan**

1) Kegiatan Pelayanan Kemetrolgian Daerah

Alokasi Anggaran : Rp.2.408.427.000

Realisasi Anggaran : Rp. 2.073.074.605 (78,84%)

Tingkat Capaian :

- Terlaksananya Operasional UPT Metrologi 12 bulan
- Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrolgian 240 Orang
- Jumlah Penyediaan alat standar pelayanan kemetrolgian 1 paket
- Jumlah gedung UPT yang terpelihara 1 Unit
- Jumlah penyediaan Alat standar kemetrolgian (DAK) 2 Unit

**Permasalahan :**

Permasalahan pada pengadaan peralatan kemetrolgian. Proses lelang telah selesai dilaksanakan dan pihak penyedia sebagai pemenang lelang telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan dokumen kontrak telah disepakati. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, pihak penyedia tidak bisa menyediakan barang sesuai dengan kontrak.

Solusi :

Memilih penyedia yang benar-benar bisa menyediakan peralatan metrologi sesuai dengan yang dibutuhkan

**f) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**

1) Kegiatan Pengembangan Ekspor dengan instansi terkait/  
Asosiasi/Pengusaha

Alokasi Anggaran : Rp. 285.755.000

Realisasi Anggaran : Rp. 274.583.950 (96,091%)

Tingkat Capaian

- Jumlah Kajian peraturan perijinan usaha perdagangan 1 dokumen
- Jumlah peserta sosialisasi ijin usaha bidang perdagangan 120 orang
- Jumlah peserta monev ijin usaha bidang perdagangan 30 orang
- Jumlah Publikasi lewat media cetak dan elektronik 12 kali
- Jumlah pelaksanaan publikasi melalui sosial media 1 paket

2) Kegiatan Pengembangan Pasar Dan Ekspor Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 1.545.404.950

Realisasi Anggaran : Rp. 1.509.166.350 (97,655%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Pameran produk yang di fasilitasi/diikuti 8 kali
- n
- Jumlah Peserta Pelatihan MPLN, Kemasan serta Pelatihan Pemasaran Dan Distribusi perdagangan 120 orang

**g) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

1) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Alokasi Anggaran : Rp. 247.175.000

Realisasi Anggaran : Rp. 243.564.650 (98,539%)

Tingkat Capaian :

- Terlaksananya Operasi Pasar Murni (OPM) barang kebutuhan strategis 3 kali
- Jumlah kajian pemetaan toko modern dan pasar tradisional ; jumlah kajian pemetaan agen LPG dan Gudang Kebutuhan Pokok Strategis; Jumlah pemetaan jalur distribusi bahan pokok strategis 3 dokumen

- ameran produk yang di fasilitasi/diikuti 8 kali

2) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Gudang Dengan Sistem Resi Gudang

Alokasi Anggaran : Rp. 83.025.000

Realisasi Anggaran : Rp. 81.867.000 (98.605 %)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Peserta Sosialisasi SRG 150 orang
- Jumlah penyediaan baliho SRG 1 unit

3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perdagangan

Alokasi Anggaran : Rp. 89.000.000

Realisasi Anggaran : Rp. 82.610.000 (92.820%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah peserta sosialisasi terkait pelayanan perdagangan 120 orag
- Terlaksananya pengendalian dan pengawasan di bidang perdagangan 9 jenis pengawasan

**h) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan**

1) Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Alokasi Anggaran : Rp. 750.000.000

Realisasi Anggaran : Rp. 699.186.351 (93,225 %)

Tingkat Capaian :

- Jumlah tempat kuliner (PIK) 1 Lokasi

2) Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Alokasi Anggaran : Rp. 1.025.875.000

Realisasi Anggaran : Rp. 993.299.199 (96,825 )

Tingkat Capaian :

- Jumlah peserta sosialisasi rencana relokasi pedagang pantai depok 100 orang
- Jumlah Kajian Penataan PKL 1 Dokumen
- Jumlah lokasi terpadu Pedagang kaki lima dan asongan 2 lokasi
- Jumlah penyediaan tenda Tenda bagi PKL 50 Unit

**i) Program Pemberdayaan Pedagang**

1) Kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan Dan Promosi Pasar

Alokasi Anggaran : Rp. 906.700.000

Realisasi Anggaran : Rp. 889.399.500 (98.092%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah peserta pendampingan APPSI; Jml Pelatihan Pedagang Pasar ; Jumlah peserta saresahan pedagang pasar; Jumlah peserta grebeg pasar 1.702 orang
- Jumlah Promosi Pasar yang terlaksana 10 kali
- Jumlah Peresmian Pasar yang terlaksana 1 kali
- Jumlah pengadaan Baliho 6 Unit

**j) Program Penataan Pasar Rakyat**

**1) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat**

Alokasi Anggaran : Rp. 3.853.031.629

Realisasi Anggaran : Rp. 3.768.470 (97.805%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah DED pembangunan pasar 1 dokumen
- Jumlah pasar yang di bangun/rehab (besar) 1 pasar
- Jumlah pasar yang di rehab ( kecil) 23 pasar
- Jumlah gudang pasar yang terbangun 1 unit
- Terbangunnya mushola pasar Dlingo 1 unit
- Terbangunnya tambatan hewan 1 paket
- Terbangunnya MCK pasar Barongan 1 paket

**2) Kegiatan Pengembangan Pasar Rakyat ber SNI**

Alokasi Anggaran : Rp. 11.500.000

Realisasi Anggaran : Rp. 10.625.000 (92.396 %)

Tingkat Capaian :

- Jumlah pendampingan pengembangan Pasar Rakyat 12 bulan

**3) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat**

Alokasi Anggaran : Rp. 5.735.449.000

Realisasi Anggaran : Rp. 5.586.175.300 (97.397 %)

Tingkat Capaian :

- Jumlah pasar yang di bangun/ direhab (DAK) 5 pasar

**4) Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Pasar**

Alokasi Anggaran : Rp. 157.570.000  
 Realisasi Anggaran : Rp. 155.767.900 (98.856 %)  
 Tingkat Capaian :

- Jumlah Evaluasi Dana bergulir; Evaluasi pendapatan; Evaluasi intensifikasi pengelolaan MCK 36 kali
- Jumlah Kajian pendataan potensi pasar 1 dokumen

### 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Perdagangan **tidak** menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal

### 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

#### SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan

		JENIS PENDIDIKAN					JML	GOLONGAN				JML
SD	SMP	SMA	D1/D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV		
4	7	75	0	12	12	0	110	8	50	43	9	110

Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2018

#### Pejabat Dinas Perdagangan Tahun 2018

NO	NAMA ASN	JABATAN	PENDIDIKAN
1	IR. SUBIYANTA HADI, M.M	Kepala Dinas	Strata 2
2	RENI MARIASTUTI, SH. MHUM	Sekretaris Dinas	Strata 2
3	YUS WARSENO, S.Pi, M.Sc	Kepala Bidang Sarana Prasarana & Distribusi Perdagangan	Strata 2
4	IR. AGUS RIYADMADI	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	Strata 2
5	BAMBANG HUDALIYANTO, SH,MM	Kepala Bidang Pengembangan Pasar	Strata 2
6	DRA. KUN ERNAWATI, M.SI	Ka. Subbag. Program, Keuangan dan Aset	Strata 2
7	AGUS BUDI WISMANTA, SE.M.Ec.Dev	Kepala Seksi Pengembangan Ekspor	Strata 2
8	ZONA PARAMITA, SE	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan	Strata 1
9	HARDIONO, SE	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Strata 1

10	NOVRIYENI , SPt	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Strata 2
11	SARI MOEMPUNY , SE, M.Si	Kepala Seksi Pendapatan	Strata 2
12	HENRY HARTANTI, SP	Ka UPT	Strata 1
13	ZUHRIYATUN NUR HANDAYANI, SP	Kepala Seksi Distribusi & Harga Barang Pokok	Strata 1
14	HARYANA, SE	Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan	Strata 1
15	SRI RUSMINIWATI, S.IP MAP	Kepala seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan	Strata 2
16	IWAN RASIA HERTANTO, ST. M.Si	Ka. Subag Tata Usaha UPT Metrologi	Strata 2

Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2018

## 5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2017-2021, dengan sinkronisasi antara bottom up planing dengan Top down planing, dimana prosesnya dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat pada forum Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten, kemudian dilakukan skala prioritas dan penyesuaian arah kebijakan perencana tingkat kabupaten.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54/2010 pasal 86 ayat (2) mengamanatkan bahwa proses perencanaan yang tertuang dalam Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dengan demikian, maka visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perencanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul.

Berikut cascading atau benang merah antara perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul dengan perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul:

Benang Merah Antara Rpjmd Kabupaten Bantul 2016-2021  
Dan Renstra Dinas Perdagangan 2017-2021

MISI DAERAH	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD
-------------	---------	-----------	-------------	---------------

	DAERAH	DAERAH		
<b>Misi 3:</b> <b>Mewujudkan</b> <b>kesejahteraan</b> <b>masyarakat</b> <b>difokuskan</b> <b>pada</b> <b>percepatan</b> <b>pengembangan</b> <b>perekonomian</b> <b>rakyat dan</b> <b>pengentasan</b> <b>kemiskinan</b>	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas.	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A
			Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor
			Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor

Sumber: RPJMD Kab. Bantul dan Renstra Dinas Perdagangan 2017-2021

## 6. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Perdagangan saat ini cukup memadai, sesuai dengan kapasitas beban kerja yang ada pada saat ini, meskipun masih terus dilakukan penambahan dan penyempurnaan sesuai kebutuhan yang semakin meningkat. Total sarana prasarana/aset yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

NO.	ASET	NILAI ASET (RP)
1	Tanah	32.622.227.570
2	Peralatan dan Mesin	10.692.308.569
3	Gedung dan Bangunan	210.939.159.675
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	115.474.900
5	Aset tetap lainnya	9.284.833
6	Aset lainnya	87.893.750
7	Aset tidak berwujud	134.758.000
	<b>Jumlah</b>	<b>254.601.107.297</b>

Sumber: Subbag PKA Dinas Perdagangan, 2018

## 7. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan urusan perdagangan.

Tabel 3

## Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perdagangan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Terjadinya gejolak harga beberapa jenis bahan pokok	Untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga perlu dilakukan pemantauan secara kontinyu dan ditindaklanjuti dengan koordinasi intensif dengan pelaku pasar, melakukan kerjasama dengan daerah lain yang menjadi pemasok bahan pokok, dan melaksanakan operasi pasar
2	Keterbatasan jangkauan pelayanan dan fasilitasi promosi produk Bantul	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan database perdagangan yang belum optimal</li> <li>● Mendapatkan Informasi pasar domestik dan ekspor yang terkini</li> </ul>
3	Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tetapi melalui mekanisme pasar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha</li> <li>● Menoptimalkan pengamanan dan penguatan pasar domestik</li> </ul>
4	pengawasan terkait dengan kualitas dan keamanan barang beredar belum optimal	pemantauan kualitas barang beredar dilakukan melalui pengujian mutu secara berkelanjutan dan diperlukan penegakan hukum secara terpadu
5	Distribusi barang komoditas bahan pokok masih cukup panjang untuk bisa sampai pada tingkat pedagang pasar, sehingga berdampak terhadap harga produk yang mahal ditingkat konsumen.	memutus jalur distribusi barang, agar lebih cepat dan efisien
6	Kebutuhan akses pasar atas produk UMKM masih luas namun upaya promosi dan pembentukan jejaring pemasaran masih belum optimal	Pemanfaatan teknologi informasi, promosi, peningkatan nilai tambah, kualitas dan diversifikasi produk sebagai upaya peningkatan kapasitas jaringan pemasaran bagi UMKM agar dapat diterima oleh pasar mancanegara dan pasar dalam negeri
7	Daya saing produk yang semakin tinggi dengan berlakunya MEA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan promosi yang lebih intensif.</li> <li>- Peningkatan daya saing.</li> </ul>
8	Mindset / pola pikir dan perilaku pedagang pasar baik dalam hal manajemen, layanan dan kebersihan lingkungan pasar yang belum maju	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Manajemen Pasar</li> <li>- Meningkatkan kapasitas pelayanan kebersihan dengan menambah armada truck sampah.</li> </ul>

No.	Permasalahan	Solusi
9	Masih ada rentenir yang beroperasi di pasar rakyat/tradisional sehingga mengurangi tingkat laba usaha pedagang.	Memperluas jangkauan/distribusi pengelolaan dana bergulir serta menambah modal, agar semakin maksimal pedagang yang terlayani.

Sumber: Dinas Perdagangan, 2018

**LAMPIRAN: III.2 FORMAT IKK UNTUK  
KABUPATEN**

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK)  
ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA  
EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KABUPATEN :**

BANTUL

**NAMA PERANGKAT  
DAERAH : DINAS  
PERDAGANGAN  
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PERDAGANGAN**

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGG ARA AN URUSAN PEMERINTAH AN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 6 program. yaitu: 1) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 2) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen 3) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 4) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 5) Program Pengembangan Ekspor Nasional 6) Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi  Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program yaitu: 1) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, dalam DPA dengan	50 %	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing- masing urusan, terlampir.

						<p>nama program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>2) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen, dalam DPA dengan nama program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</p> <p>3) Program Pengembangan Ekspor Nasional, dengan nama Program Pengembangan dan Peningkatan Ekspor</p>		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Ada, ada banyak 53 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat dengan 40 SOP</li> <li>2. Bidang Pengembangan Perdagangan dengan 4 SOP</li> <li>3. Bidang Sarpras dan Distribusi Perdagangan dengan 2 SOP</li> <li>4. Bidang Pengembangan Pasar dengan 5 SOP</li> <li>5. UPT Metrologi dengan 2 SOP</li> </ol>	Ada 53 SOP	SOP yg dimaksud` adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak 6</li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak 6</li> </ul> <p>Terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Nomor 12/2016</li> </ol>	100 %	Normalisasi

				PERMEN		<p>tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Perda Nomor 17/2012 tentang Pengelolaan Pasar</p> <p>3. Perda Nomor 2/2016 tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>4. Perda Nomor 13/2014 tentang Perijinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>5. Perda Nomor 7/2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p> <p>6. Perda Nomor 7/2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir</p>		
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 15</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 16</li> </ul>	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----. <b>TIDAK ADA</b>	tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017.

<sup>1</sup> Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Dinas Perdagangan, <b>sebanyak 110 personil</b>  - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.018 personil	..... %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjurangan, sebanyak 10 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.	93,75 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 15 jbt.	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2017-2021 2. Renja 2018 3. DPA 2018 4. PK 2018	4 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
					Jumlah Program RKPD yang	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat	100 %	Sumber data

		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Daerah, sebanyak 13 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 13 program		Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir	- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA		Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-

	ASP EK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perangkat Daerah		dalam RKA Perangkat Daerah	dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Perangkat Daerah, sebanyak 13 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program.	100 %	dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, 24.683.697.341,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp----	..... %	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.101.056.629,- - Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 23.533.722.621,-	53,08 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 639.892.858- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.850.669.712,-	8,58 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat 639.892.858. - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp23.533.722.621,-	2,73 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
						Apabila Ada, Lapaoran keuangan	Ada sebanyak	

		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, CaLK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, CaLK)	ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	3 jenis : 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
--	--	-----------------------------------	----	--	--	---	---	---

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Sebutkan jenis dokumennya: 1. Kartu Inventaris A 2. Kartu Inventaris B 3. Kartu Inventaris C 4. Kartu Inventaris D 5. Kartu Inventaris E 6. Kartu Inventaris F 7. Buku Inventaris	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 254.409.402.797,-	0%	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya : 1. Media cetak 2. Media Elektronik 3. Media online 4. Mobil Keliling 5. Papan Pengumuman 6. Kotak Saran 7. Email 8. Leaflet	Jumlah sebanyak 8 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas	21	Keberadaan	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan

		as terhadap partisipasi masyaraka t		Survey Kepuasan Masyarakat	Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perdagangan (IKM)		yang dilakukan oleh Pemda.
--	--	---	--	-------------------------------	---	---	--	-------------------------------



**TATARAN PELAKSANA  
KEBIJAKAN  
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB  
DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP  
LPPD TAHUN 2017**

**KABUPATEN:---**

-----

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>URUSAN WAJIB</b>						
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>1</b>	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak ----- x 100 % Jumlah anak usia 4 - 6 tahun	.....%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		<b>2</b>	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas	.....%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		<b>3</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	.....%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		<b>4</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	.....%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil

		<b>5</b>	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat \& jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>6</b>	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat \& jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>7</b>	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>8</b>	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>9</b>	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>10</b>	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>11</b>	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>12</b>	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>13</b>	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>14</b>	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu ----- x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>15</b>	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn ----- x	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan

			100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama		
		<b>16</b>	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD  ----- x  100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>17</b>	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin  ----- x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>18</b>	Cakupan kunjungan bayi  ----- x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>3</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>19</b>	Penanganan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani (m3)}}{\text{Volume produksi sampah (m3)}} \times 100 \%$	..... %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan
		<b>20</b>	Kebersihan	$\frac{\text{Jumlah pasar rakyat (harian) yang tergolong baik}}{\text{Jumlah seluruh pasar raakyat harian}} \times 100 \%$ <p>15 pasar ----- x 100% = 93,75 % 16 pasar</p>	93,75 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan. Tergolong baik sesuai kriteria Adipura
		<b>21</b>	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	.....	Pembilang berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah/Dinas Kebersihan dan Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		<b>22</b>	Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ada}} \times 100 \%$	..... %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah
<b>4</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>23</b>	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100 \%$	..... %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (klasifikasi kondisi seluruh panjang jalan)
		<b>24</b>	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum

		<b>25</b>	Rumah Tangga Per-sanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kab/Kota) sumber data berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
--	--	-----------	---------------------------	--	--------	--

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>26</b>	Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
		<b>27</b>	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
<b>5</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>28</b>	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah
		<b>29</b>	Lingkungan pemukiman kumuh	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
		<b>30</b>	Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas PU

N O	URUSAN	NO .	IK K	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Kepemudaan & Olahraga	31	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	$\frac{\text{Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	.....	Pembilang Sumber data dari Dispora Penyebut sumber data dari Dukcapil
		32	Lapangan olahraga .	$\frac{\text{Jumlah lapangan olahraga di kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$ <p>Lapangan olah raga adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lap sepakbola, = ----- lap</li> <li>2. lap basket, = ----- lap</li> <li>3. lap volley, , = ----- lap</li> <li>4. lap. bulu tangkis, = ----- lap</li> <li>5. <u>kolam renang.</u>, = ----- lap Jumlah = ----- lap</li> </ol>	.....	Jumlah sarana Olah Raga yg dikelola pemerintah termasuk yg dikelola oleh Sekolah Negeri
7	Penanaman Modal	33	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN thn 2017} - \text{Realisasi PMDN 2016}}{\text{Realisasi PMDN 2016}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas/ Badan Penanaman Modal daerah (BPMD)
8	Koperasi & UKM	34	Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data Dinas Koperasi
		35	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan melampirkan rekap SIUP kecil

9	<b>Administrasi Kependudukan &amp; Catatan Sipil</b>	<b>36</b>	Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data Dinas Duk Cakil
---	--	-----------	-----------------	---	--------	-----------------------------

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		37	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	.....	Sumber data dari Dinas Dukcapil
		38	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	Sudah/ Belum *)	Sumber data dari Dinas Dukcapil
10	Tenaga Kerja	39	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta pogram Jamsostek aktif}}{\text{Jumlah pekerja/buruh}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan
		40	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Tenaga Kerja (melampirkan rekap Surat Pengantar Rekrut)
11	Pangan	41	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.	Ada/tidak*)	Sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura atau Dinas/Badan yang menangani ketahanan pangan
		42	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	.....	Sumber data pembilang dari Dinas Ketahanan Pangan Jenis pangan utama : padi, jagung, Sagu, Umbi), sedangkan sumber data penyebut dari Dinas/Bagian Dukcapil
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	43	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\% \text{ Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$	.....%	Melampirkan rekap data pekerja perempuan

	<b>Anak</b>	<b>44</b>	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf}}{\% \text{ Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun}} \times 100$	.....%	Sumber data dari Dinas PPA/Dinas Pendidikan
--	-------------	-----------	---	---	--------	---

N O	URUSAN	NO.	IK K	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>45</b>	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas PPA/Dukcapil
<b>13</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>46</b>	Prevalensi peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari BKKBN
		<b>47</b>	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan}}{\% \text{ PLKB/PKB}} \times 100$	.....%	Sumber data dari BKKBN/ Dinas Sosial/ Dinas PPPA/ KBKS
<b>14</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>48</b>	Angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}}$	.....	Sumber data dari dinas perhubungan
<b>15</b>	<b>Komunikasi &amp; Informatika</b>	<b>49</b>	Web site milik pemerintah daerah	Ada / tidak	Ada/tidak *)	Sumber Data dari Biro Humas/ Dinas Kominfo
		<b>50</b>	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun	.....kali	Sumber(Penyelenggara Kegiatan) Biro Humas/ Dinas Kominfo
<b>16</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>51</b>	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di suatu daerah}}{\text{Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah}} \times 100 \%$	.....%	Sumber Data dari Dinas Pertanahan (dengan melampirkan rekap Sertifikat)
		<b>52</b>	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100 \%$	.....%	Sumber : Dinas Pertanahan (rekap surat permasalahan)
		<b>53</b>	Penyelesaian Ijin Lokasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Pertanahan

N O	URUSAN	NO	IK K	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>17</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat &amp; Desa</b>	<b>54</b>	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\% \text{ Jumlah PKK}} \times 100$	.....%	Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		<b>55</b>	Posyandu	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\% \text{ Total Posyandu}} \times 100$	.....%	Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>18</b>	<b>Sosial</b>	<b>56</b>	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi yang terdapat di suatu daerah	..... .buah	Sumber data dari Dinas Sosial
		<b>57</b>	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun}}{\text{Total}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Sosial
		<b>58</b>	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Sosial
<b>19</b>	<b>Kebudayaan</b>	<b>59</b>	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	..... kali	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
		<b>60</b>	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	..... buah	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
		<b>61</b>	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Statistik	62	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada atau tidak		Sumber data dari Bappeda
		63	Buku "PDRB kabupaten"	Ada atau tidak		Sumber data dari Bappeda
21	Kearsipan	64	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data pembilang dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip Sumber data penyebut dari Bagian Organisasi
		65	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan	.....	Sumber data dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip
22	Perpustakaan	66	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}$	.....	Sumber data dari Kantor perpustakaan daerah
		67	Pengunjung perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani (10-58 thn)}}$	.....	Sumber data pembilang dari Kantor perpustakaan daerah Sumber data penyebut dari Dukcapil
<b>URUSAN PILIHAN</b>						
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
		2	Konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>	<b>3</b>	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) ----- Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	.....	Sumber data dari Dinas Pertanian
		<b>4</b>	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2016	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian ----- x 100% Jumlah total PDRB	.....%	Sumber data dari Dinas Pertanian atau dari buku PDRB Sektor pertanian (harga berlaku)
<b>3</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>5</b>	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	.....orang	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata
		<b>6</b>	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata ----- x 100% Jumlah total PDRB	.....%	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata atau buku PDRB sub sector  Perdagangan (jasa, hotel, restoran) dg menggunakan harga berlaku

N O	URUSAN	NO	IK K	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Perindustrian	7	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2017	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Perindustrian atau buku PDRB sector Industri Pengolahan (harga berlaku)
		8	Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri tahun 2017} - \text{Jumlah Industri tahun 2016}}{\text{Jumlah Industri s/d tahun 2017}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Perindustrian
5	Perdagangan	9	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2018	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$ <p>Rp2.105.430.000.000,- -----x 100% = 8,92% Rp24.372.820.000.000,-</p>	8,92 %	Sumber data dari Dinas Perdagangan atau buku PDRB sub sector Perdagangan (harga berlaku)
		10	Ekspor Bersih Perdagangan	<p>Nilai ekspor bersih = nilai ekspor - nilai impor</p> <p>Nilai ekspor = 206.555.463,64 US\$</p> <p>Nilai impor = 1.382.500 US\$</p> <p>Nilai ekspor bersih = 206.555.463,64 - 1.382.500 = 205.172.963,64 US\$</p>	205.172.963,64 US\$	Sumber data dari Dinas Perdagangan
6	Transmigrasi	11	Transmigran swakarsa	$\frac{\text{Jumlah transmigran swakarsa}}{\text{Jumlah transmigran}} \times 100\%$	.....%	Sumber data Dinas Transmigrasi
<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
		1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA

		2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Sumber data dari BAPPEDA
		4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	<p>Jumlah program RKPD tahun berkenaan  ----- x 100 %  Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan</p>	.....%	Sumber data pembilang dan Penyebut dari BAPPEDA



		5	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	.....buah	Sumber data dari Dinas Kominfo
		6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Ada/tidak*)	Sumber data dari Kantor PTSP / BP2TPM
<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik di daerah	.....Keg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol (kegiatan pembinaan politik yang didanai dari APBD)
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	.....Keg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol (kegiatan pembinaan politik yang didanai dari APBD)

